BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perputaran arus ekonomi global yang terus-menerus berkembang dari masa ke masa begitu banyak memberikan dampak positif pada setiap negara. Akan tetapi, di Indonesia dampak tersebut tidak berpengaruh secara signifikan, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir periode 2013 tercatat masih belum mencapai target yang seharusnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2013 sebesar 5,81 persen. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2013 tercatat 6,03 persen. Sehingga secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada semester I 2013 sebesar 5,92 persen. Sementara perkiraan pertumbuhan menurut Kementerian Keuangan sebesar 6,0 sampai 6,1 persen. Untuk itu perlu ekstra (*effort*) di semester II. Perlambatan ekonomi memang berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Tapi secara umum konsumsi tidak menurun. Ini berarti ada persoalan dalam perluasan basis pajak yang dilakukan Direktorat (Menkeu: Chatib Basri).

Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu dan kini sudah sangat dirasakan bahwa pajak menjadi suatu kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak dan untuk tahun 2013 target penerimaan pajak dalam RAPBN sebesar Rp1.031,7 T, naik 5,2 % dari target APBN-P 2012,

atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi tahun 2007, akan tetapi hal ini belum cukup menggembirakan karena dibarengi dengan pertumbuhan tunggakan pajak atau jumlah piutang pajak dari tahun ke tahun yang juga semakin meningkat dan hal ini diakibatkan oleh adanya *law enforcement* (penegakan hukum, pemeriksaan pajak) yang tinggi, berdasarkan hasil evaluasi per tahun Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Karena itu, Subdirektorat Penagihan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Ditjen Pajak, berupaya mencairkan jumlah piutang Wajib Pajak. Ada sekitar 40 juta individu dan 4,5 juta badan usaha yang belum membayar pajak walaupun laba atau pendapatannya sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ini mengurangi pendapatan negara yang harusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum. Badan usaha yang baru bayar pajak itu hanya 520 ribu, itu masih 10%. (Dirjen Pajak: Fuad Rahmany).

Tantangan ke depan pasti adanya jumlah piutang pajak yang semakin meningkat. Target penerimaan pajak yang tinggi pasti diikuti dengan pertumbuhan piutang yang tinggi, karena peningkatan tindakan *law enforcement*. Otomatis tantangan kita ke depan mencairkan jumlah piutang itu menjadi kalau bisa *zero growth* (pertumbuhan nol). Jumlah piutang yang semakin lama semakin tinggi akibat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang semakin rendah. Untuk itu pihaknya akan melakukan upaya untuk menekan penambahan piutang dan memperbesar tingkat pencairannya. Salah satunya dengan membuat suatu kebijakan atau suatu aturan baru yang mendukung tindakan penagihan di lapangan. (Kasubdit Penagihan, Dodik Samsu Hidayat).

Namun, dalam mengurangi jumlah piutang Wajib Pajak tersebut bukan berarti tanpa adanya kendala, terutama tentang kesadaran hukum masyarakat akan bayar pajak. Kegiatan seksi penagihan mulai dari penerbitan Surat Ketetapan sampai pada pelayangan Surat Teguran, tetap tidak memberikan efek jera. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syaiful salah seorang pegawai seksi penagihan di KPP Pratama Bandung Cibeunying bahwa penerbitan Surat Teguran, tidak memberikan hasil yang diharapkan sehingga tahapan selanjutnya yaitu penerbitan Surat Paksa yang dianggap cukup efektif dan membuat Wajib Pajak gerah.

Lagi menurut Syaiful bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses penagihan pajak diantaranya Wajib Pajak yang tidak diketahui keberadaannya atau pindah domisili yang mengakibatkan Surat Paksa yang dilayangkan tidak sampai ke Wajib Pajak yang bersangkutan. Selain itu penagihan aktif yang dilakukan juga tidak efektif dikarenakan tidak adanya upaya penyelesaian dari Wajib Pajak setelah dilakukan penagihan secara paksa. (Syaiful:2014)

Tindakan penagihan dengan Surat Paksa juga didukung oleh pernyataan Waluyo, bahwa perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar dan hal ini dapat berdampak pada penurunan penerimaan pajak begitupun sebaliknya. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat. Waluyo (2009).

Segala tindakan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak, baik pajak-pajak pusat maupun pajak-pajak daerah haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta keadilan di kedua belah pihak baik Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili pejabat. Tujuan diubahnya Undang-Undang No 19 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa antara lain yaitu agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan khususnya dalam tunggakan pajak, menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dengan kepentingan negara, mengatur tindakan penagihan pajak, dan satu hal lagi yaitu memberikan perlindungan hukum kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta pelunasan tunggakan pajak sesegera mungkin.

Di bawah ini, penulis sajikan data tentang perkembangan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Surat Paksa yang diterbitkan pada
KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2009 – 2013

Tahun	Jumlah Surat paksa		Pencairan Surat Paksa
	(lbr)	(Rp)	(Rp)
2009	226	659,429.00	477,977.00
2010	380	6,082,932.00	5,457,248.00
2011	514	8,914,774,103.00	4,809,218,838.00
2012	260	2,235,841,666.00	1,133,142,353.00
2013	1,175	6,368,155,808.00	2,872,930,637.00

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cibeunying Data Diolah

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan selama tahun 2009-2013 mengalami peningkatan secara terus-menerus dengan pencairan atau pelunasan yang selalu di bawah target pencapaian, yang artinya kondisi ini mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Dimana data tentang penerimaan pajak selengkapnya, penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Data Penerimaan Pajak pada KPP

Pratama Bandung Cibeunying Periode 2009 - 2013

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2009	595,845,200,000.00	646,977,800,000.00
2010	832,429,400,000.00	738,391,800,000.00
2011	967,660,500,000.00	898,906,800,000.00
2012	901,720,900,000.00	1,202,641,400,000.00
2013	1,420,079,600,000.00	1,262,728,100,000.00

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cibeunying Data Diolah

Tabel 1.2 di atas memperlihatkan bahwa tingkat realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying mengalami penurunan dari tahun 2010-2011 dan 2013. Terutama untuk tahun 2013, realisasi penerimaan pajak menurun secara signifikan dari jumlah penerimaan target penerimaan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi sorotan utama penulis bahwa peningkatan jumlah piutang pajak dan bertambahnya Surat Paksa yang diterbitkan akan berdampak pada penerimaan pendapatan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas menunjukan bahwa pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying belum memberikan hasil yang optimal dan hal ini dapat mengakibatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying menjadi berkurang. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah usulan penelitian yang berjudul : **"Analisis penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat penerimaan pendapatan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying ".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1) Pertumbuhan tunggakan pajak atau jumlah piutang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 cenderung bertambah yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2) Realisasi penerimaan pendapatan pajak dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di bawah target penerimaan yang ditetapkan di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian di atas dan kemudian diidentifikasikan pada sub bab identifikasi masalah, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana perkembangan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2) Bagaimana perkembangan tingkat penerimaan pendapatan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3) Bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat penerimaan pendapatan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Untuk mengumpulkan data dari berbagai informasi tentang perkembangan pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pendapatan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2) Untuk mengetahui tingkat penerimaan pendapatan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

3) Untuk mengetahui penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat penerimaan pendapatan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah informasi bagi instansi guna mengevaluasi kembali tentang pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Selain itu, untuk mengetahui realisasi perkembangan penerimaan pajak berdasarkan target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi Penulis

   Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas terutama mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Bandung Cibeunying.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil dari penelitian diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya.

3) Bagi Pengembangan Ilmu Keuangan dan Perbankan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan. Serta dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan dan pembaca pada umumnya dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Jalan Purnawarman No. 19-21 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 11 November 2013 sampai dengan 20 Juni 2014.

Tabel 1.3
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Keterangan	Waktu																													
		Nov. 2013				Des. 2013				Jan. 2014				Feb. 2014				Mar. 2014				Apr. 2014				Mei 2014				Jun. 2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	**Tahap Persiapan**																																
	1. Sosialisasi usulan penelitian																																
	2. Pengajuan tema dan judul penelitian																																
	3. Penyusunan dan pengumpulan usulan penelitian																																
	4. Penentuan tempat penelitian																																
II	**Tahap Pelaksanaan**																																
	1. Pengumpulan data perusahaan																																
	2. Bimbingan dengan dosen pembimbing																																
III	**Tahap Pelaporan**																																
	1. Penyusunan Tugas Akhir																																
	2. Pengumpulan Tugas Akhir																																
	3. Ujian sidang Tugas Akhir																																